

Abstrak

Skripsi ini menjelaskan netralitas birokrasi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, yakni bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh birokrasi untuk menciptakan *imaga* netral pada masyarakat serta bagaimana melakukan perlindungan kepada birokrasi agar terhindar dari tarikan politik pada pilkada, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menciptakan netralitas di dalam birokrasi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam *Depth Interview* dan data temuan di lapangan untuk menjelaskan fenomena perilaku politik ASN pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Dari hasil penelitian dan analisis data ini menemukan bahwa respon ASN pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh politik yang ada. Strategi yang digunakan dalam menciptakan birokrasi yang netral yakni dengan memanfaatkan hierarki yang kuat dirasa gagal dalam menciptakan netralitas birokrasi karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN serta hambatan di lapangan yang ditemui yakni baik faktor internal dan eksternal menjadi penghambat birokrasi menciptakan posisi netral pada pelaksanaan pilkada karena masih banyaknya ASN yang ikut dalam politik praktis.

Kata Kunci:

Netralitas, ASN, Birokrasi, hierarki, politik.

Abstract

This thesis explains the neutrality of the bureaucracy in the election of regional heads simultaneously in 2015, namely how the efforts made by the bureaucracy to create a neutral image in society and how to protect the bureaucracy to avoid the political pull on the elections, as well as the constraints faced in creating neutrality in the bureaucracy.

This research was conducted in Lamongan regency using qualitative research method with descriptive design, where the data collection process was done with depth interview and Depth Interview findings data in the field to explain the phenomenon of state civil apparatus

political behavior in Lamongan District Election 2015.

From the results of research and analysis of this data found that the ASN response in the elections of district head Lamongan Year 2015 can not escape the political influence that exists. Strategy used in creating a neutral bureaucracy that is by utilizing a strong hierarchy is perceived to fail in creating bureaucracy neutrality because many violations committed by state civil apparatus and obstacles in the field encountered that both internal and external factors become inhibitors of bureaucracy create a neutral position on the implementation of elections because it is still the number of state civil apparatus involved in practical politics.

Key Word:

Neutrality, State civil apparatus, Bureaucracy, hierarchy, politics.